

Abstrak

Penelitian ini bertujuan; 1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan penyalah guna narkoba yang dapat menjamin hukum yang adil dan bermanfaat, 2. Untuk menganalisis dan mengkaji harmonisasi pengaturan terhadap penyalah guna narkoba yang adil dan bermanfaat di Indonesia, 3. Untuk menemukan konsep Pengaturan Penyalah Guna Narkoba yang adil dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaturan Perundang-undangan antara Pasal 111, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba belum memiliki nilai kepastian hukum, Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba tersebut harus dibatasi dan hanya ditujukan kepada pengedar narkoba. Supaya Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang mempunyai nilai kepastian hukum, perlunya harmonisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 dan Pasal 112 dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang seringkali tumpang tindih dalam penerapannya. Kualifikasi penerapan Pasal 111 dan 112 diperuntukan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana berupa memiliki atau menguasai narkoba. Sementara Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterapkan bagi seseorang sebagai pengguna narkoba. Reformulasi Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimasa mendatang diharapkan lembaga legislatif merumuskan peraturan secara tegas sanksi hukum pidana berupa tindakan yaitu rehabilitasi medis terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.

Kata Kunci: Narkoba; Reformulasi; Harmonisasi; Penyalah Guna

Abstract

This research aims; 1. To examine and review the regulations regarding drug abusers which can guarantee the creation of laws that are just and beneficial, 2. To examine and examine the harmonization of regulations regarding drug abusers that are fair and beneficial in Indonesia, 3. To understand the concept of Narcotics Abuse Regulations that are fair and beneficial. This research uses a normative method with a legislative, conceptual, case approach and comparative approach. The research results show that the legislative arrangements between Article 111, Article 112 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law do not have legal certainty, Article 111 and Article 112 of the Narcotics Law should be limited and only aimed at drug dealers. In order for Article 111 and Article 112 of the Law to have the value of legal certainty, it is necessary to harmonize Article 111 and Article 112 of Law Number 35 of 2009 with Article 127 of Law Number 35 of 2009, which often overlap in articles. application. The qualifications for applying Articles 111 and 112 are intended for those who commit criminal acts in the form of possession or control over someone with narcotic drugs. Meanwhile, Article 127 of Law Number 35 of 2009 applies to someone who is a narcotics user. In the future, it is hoped that the reformulation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics can be formulated by the legislative body to strictly formulate criminal legal sanctions in the form of measures, namely medical rehabilitation for narcotics abuse itself.

Keywords: Narcotics; Reformulation; Harmonization; Abusers